

KONSEP IBNU KHALDUN DALAM POLITIK EKONOMI



Oleh:

MOHAMMAD MUSHOFFA

NIM: 1120310043

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam
Prodi Hukum Islam
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam

YOGYAKARTA
2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Mushoffa
NIM : 1120310043
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali dalam bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Mohammad Mushoffa, S.H.I
NIM: 1120310043



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP IBNU KHALDUN DALAM POLITIK
EKONOMI
Nama : Mohammad Mushoffa
NIM : 1120310043
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 26 November 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 08 Januari 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KONSEP IBNU KHALDUN DALAM POLITIK
EKONOMI
Nama : Mohammad Mushoffa
NIM : 1120310043
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Ibnu Burdah, M.A.
Pembimbing/Penguji : Dr. A. Yani Anshori, M.A.
Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 November 2015

Waktu : 11.00-12.00
Hasil/Nilai : B+
Predikat Kelulusan : Memuaskan /~~Sangat Memuaskan~~ /~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSEP IBNU KHALDUN DALAM POLITIK EKONOMI

yang ditulis oleh:

Nama	: Mohammad Mushoffa
NIM	: 1120310043
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juni 2015

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan individunya, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Disamping dalam dinamika sosial manusia butuh pengatur karena tidak mungkin dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus menang dengan individu lainnya, maka disini dibutuhkan peran sebuah institusi maka dibentuknya negara untuk mengatur semuanya supaya kebutuhan manusia dapat terpenuhi, oleh karena itu peran negara sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya ekonomi sebagai bentuk kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini menurut Ibnu Khaldun negara harus berperan aktif dalam mengatur harga serta menstabilkan perekonomian supaya kehidupan manusia dapat terpenuhi dengan adil dan masyarakat menjadi masyarakat yang makmur.

Tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data lebih menekankan aspek analisa dan kajian teks, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini. Penelitian ini teknik analisisnya menggunakan metode normatif yaitu Konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Sifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Maka untuk itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis. Pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan dan mengevaluasi serta mensintesis untuk memperoleh fakta-fakta dan kesimpulan yang kuat.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah harus bisa mengendalikan harga dan memberi fasilitas. Mengendalikan harga dengan cara memperingan pajak supaya dalam produksi tidak mengeluarkan banyak biaya, disini lain pemerintah memberikan fasilitas alat tukar menukar dalam bentuk uang, karena uang ini selain sebagai bentuk nilai kesejahteraan, uang juga bisa sebagai ukuran pertukaran dan penyimpanan nilai. pengendalian harga di pasar yang dilakukan oleh negara dilakukan dengan cara memperingan pajak, karena dengan keringanan pajak ongkos produksi yang semakin kecil akan meningkatkan produktivitas sehingga sistem produksi semakin kuat. Ibnu Khaldun juga menyoroti realisasi tujuan penyelenggaraan ekonomi dalam negara seorang pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut tanpa ada bantuan dari para pembantunya seperti Wazirah, *Al Hijabah* (Penjaga Pintu), Departemen Pekerjaan Umum dan Retrubusi, Bidang Korespondensi dan Sekertaris Kerajaan, Polisi, Palingma Armada laut dalam bentuk *Wazirah, Al Hijabah* (Penjaga Pintu). Ibnu Khaldun menyoroti tentang tentang fokus Negara dalam membangun sektor produksi Ibnu Khaldun menekankan untuk meningkatkan produksi barang di dalam negeri. Karena dengan melihat potensi yang ada dalam negeri maka fokus masyarakat untuk mempunyai spesialisasi kerja akan mendorong produktivitas pekerja sehingga proses produksi menghasilkan *out put* maksimum sehingga Negara bisa ekspor.

MOTTO

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَاهَلَ

“Seorang dikatakan berilmu, jika ia masih mau belajar. Dan jika ia merasa telah berilmu, sungguh sebenarnya ia bodoh”

(Ibnul Mubarak)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan tesisku ini untuk
almamaterku tercinta, Studi Politik dan
Pemerintahan Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Angkatan 2011*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha’	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭahdiakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fatḥah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I

--- ُ ---	Ḍammah	U	U
-----------	--------	---	---

5. Vokal Panjang

- a. Fathāḥ dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathāḥ dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

كريم Karim

- d. Ḍammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathāḥ dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathāḥ dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A‘antum

لإن شكرتم La‘in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa hanya ditujukan kepada tauladan ummat Islam yaitu Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Tesis dengan judul “ Konsep Ibnu Khaldun tentang Kekuasaan Pemerintahan dan Ekonomi”, alhamdulillah selesai guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Ilmu Hukum Islam pada Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Dr. H. Sayafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Sekertaris Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materiil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala hal yang telah diberikan menjadikan shaleh serta dibalas oleh Allah SWT dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 29 Juni 2015

Penyusun

Mohammad Mushoffa, S.H.I
1120310043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUSI TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP HUBUNGAN POLITIK DAN EKONOMI.....	21
	A. Proses Berdiri dan Berkembangnya Negara	25
	1. Awal Mula Berdirinya Negara	25
	2. Bentuk Pola Kepemimpinan Negara.....	30
	B. Proses Berjalannya Sebuah Kekuasaan	34
	C. Kedudukan Kekuasaan dan Syarat Kepala Negara	39
	D. Karakteristik Kekuasaan Mempengaruhi Ekonomi	50
BAB III	PERAN NEGARA DALAM MEKANISME POLITIK EKONOMI.....	56
	A. Dampak Kebijakan Penguasa terhadap Mekanisme Pasar.....	57
	B. Perilaku Materialis Penguasa Mempengaruhi Pasar	63
	C. Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Negara	70
BAB IV	MEKANISME PENGELOLAAN PEREKONOMIAN NEGARA	76
	A. Produksi dan Harga Sebagai Langkah Awal Pembangunan Ekonomi	78
	B. Sistem Nilai Dalam Pembagian Tenaga Kerja dan Upah	92
	C. Pajak Sebagai Roda Perekonomian.....	100
BAB V	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	117
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

Biografi Ulama

Curriculume Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang kuat maupun lemah. Negara juga merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan, sehingga diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.¹

Selain itu, negara memiliki batasan peran dan fungsi, antara lain, hukum dalam suatu negara merupakan kerangka dan batas kehidupan masyarakat. Satu wilayah negara harus dikuasai satu lembaga, tidak lebih. Norma-norma kelakuan yang ditetapkan oleh negara berlaku definitif. Selain itu, negara harus memiliki pengakuan. Baik dari luar, maupun masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara untuk menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara tidak hanya sistem kekuasaan, akan tetapi negara bisa berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.

¹ Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 86.

Mekanisme demikian ini memberikan peluang bagi Negara untuk merespon dan memanaj dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan supaya keadaan Negara ini dapat diakui serta peran Negara sebagai penengah dalam permasalahan masyarakat begitu kelihatan. Dalam sebuah Negara pastinya ada yang menjalankan roda berlakunya sebuah pengaturan Negara sehingga tidak terjadi stagnasi keberadaan Negara dalam masyarakat. Hal ini menuju kepada kekuasaan. Kekuasaan ini lebih mengarah kepada pengaturan dalam menata masyarakat sehingga terjadi kehidupan yang harmonis.

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkahlaku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadisesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.² Kekuasaansenantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunan dalam pemerintahan. Makna pokok dari kekuasaan yaitu hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, dan dapat dihitung hasilnya.

Dalam negara, wajah kuasa atau kekuasaan dapat menjadi suatu hubungan, yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak lain untuk melakukan hal yang sebenarnya. Pengertian ini merujuk pada kuasa atas orang lain. Kuasa seseorang atas orang lain akan terjadi secara

² Miriam Budiardjo, *Konsep Kekuasaan; Tinjauan Kekuasaan dalam Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 9.

timpang. Kuasa ini terjadi ketika seseorang menciptakan secara rutin dampak-dampak yang lebih besar atas orang lain, namun tidak terjadi. Maka disinilah relasi kuasabekerja atau berada.

Berbeda dengan Marx yang berpendapat bahwa negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, kelas yang menguasai alat-alat produksi, untuk menindas kelas-kelas yang lain. Karena itu yang diperlukan adalah kemenangan kelas yang tidak mempunya, yang baru tanpa negara, setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya dan setiap orang akan mengambil bagian dari milik bersama sesuai dengan kebutuhannya.³

Padahal Negara berfungsi sebagai lembaga pusat pemersatu masyarakat. Fungsi dasar dan hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah penetapan aturanaturan kelakuan yang mengikat, saling menghormati hak-hak asasi antar idivid dan masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan tentram dalam suatu negara. Maka Ibn Khaldun berpandangan untuk menjalankan fungsinya, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Dengan kriteria seorang yang berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keturunan *Quraisy*. Kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Mustahil seorang dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal jika tidak mempunyai perangkat keilmuan. Kontekstualisasi dari syarat ‘dari keturunan *Quraisy*’ adalah bahwa kepala negara atau pemerintah harus

³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Model* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 170.

mempunyai kewibawaan dan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak legitimate akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya.

Bagi Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas bebrapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, multikultural, dan multireligius, tidak mutlak harus berdasarkan Islam tetapi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh (*soul*) dan jiwa (*spirit*) dari peraturan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.⁴

Maka tidak heran jika sebuah Negara dalam menjalankan perekonomian hidup masyarkat, mekanisme kekuasaan sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian. Karena Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah

⁴ Muhammad Sobary, "*Dialog Intern Islam: Ukhuwah Islamiyah*" dalam *Passing Over* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 74.

dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Maka jika mengacu hal tersebut dalam pemikiran Ibn Khaldun tentang Kekusaan pasti memiliki ugensinya antara pemerintah dalam hal ini yang mengatur dengan ekonomi, supaya perjalan ekonomi tersebut berjalan lancar dengan semestinya, apalagi Inu Khaldun adalah sosok tokoh yang juga menyoroti tentang kedua tema tersebut. Disisi lain ajaran Islam memiliki ajaran tentang sistem ekonomi yang berbeda dengan sisitem ekonomi yang lainnya. Dalam ajaran Islam memiliki pandangan syariat yang membentuk pandangan dunia dan selakigus menentukan sasarannya serta stretegi yaitu *Maqasid asy-syari'ah* yang juga didasari tentang konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan (*falah*), dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), dan menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial ekonomi dan kebutuhan spiritual. Hal ini disebabkan karena adanya umat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata Allah dimuka bumi dan sekaligus hamba-hambaNya, yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan bathin, kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual. Tujuan syari'at mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas syari'at.⁵

⁵ M. Umer Chapre, *Islam dan tantangan Ekonomi*, trj Ikhawan Abidin, *Islam and Economic Challenge*, Cet ke- 1 (Jakarta: Gema Isnani Press, 2000), hlm, 7.

Melihat itu semua jelas kaitannya kekuasaan sebagai penopang segala urusan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi memberikan sebuah perekonomian yang stabil sehingga keberlangsungan kehidupan dan toleransi masyarakat semakin besar. Maka tidak heran jika dalam pemikiran Ibn Khaldun tentang kekuasaan dan ekonomi perlu diteliti lagi karena ketika sebuah pemikiran dituangkan dalam sebuah karya pastinya ada keterkaitan satu karya dan karya lain, apalagi ini terdapat dalam satu buku hanya yang membedakan adalah temanya mungkin ada persamaan dan pandangan dalam kaitannya ekonomi politik ketika itu supaya kehidupan masyarakat menjadi relevan.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, atas dasar latar belakang tersebut, yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Negara terhadap sistem ekonomi dalam pandangan Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana Konsep politik ekonomi Ibnu Khaldun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah tentunya penelitian yang dijalankan ini mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian sehingga penelitian ini dapat berguna bagi khazanah keilmuan, untuk itu tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah.

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan tentang Konsep politik Ibnu Khaldun dalam pemerintahan dan ekonomi sebagai satu hal yang berkaitan, sehingga dapat menjadi rujukan perpolitikan dewasa ini.
- b. Memberikan wawasan terhadap pengkaji politik Islam dalam era demokrasi khususnya dalam bidang politik ekonomi.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Menambah khazanah kepustakaan dalam Studi Islam, serta wacana keislaman tentang politik ekonomi Islam.
- b. Dapat memberikan kontribusi bagi kajian politik Islam dalam hal ini adalah berkaitan dengan politik khususnya dalam khazana pembahasan tentang politik ekonomi Islam.
- c. Menambah pengkayaan terhadap kajian politik dan pemikiran dalam kajian politik Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebelum membahas masalah kekuasaan pemerintah dan ekonomi Ibnu Khaldun setidaknya harus memperjelas posisi penelitian yang dilakukan ini supaya dapat memosisikan karya ini dengan karya-karya yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun. Untuk itu Penulis memaparkan beberapa tulisan atau karya yang berkaitan atau yang telah ada sehingga supaya tidak ada kesamaan dalam pembahasan kajian ini.

Dalam Karakteristik Pemikiran Ibnu Khaldun yang ditulis oleh Hasaruddin dengan memaparkan tentang ide pemikirannya khususnya tentang politik, dalam pemikirannya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Politik dalam pemikiran Ibn Khaldun merupakan suatu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja, sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu makhluk lain yang berpolitik, sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Karena itu hendaknya politik itu dihadapi dan didekati manusia dengan segi-segi terbaik yang dimiliki dirinya, bukan dengan segi-seginya yang terburuk. Segi-segi yang terburuk itu adalah apa yang dinamakan oleh Ibn Khaldun dengan sisa-sisa kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Kemudian Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang tugas manusia dalam bernegara yaitu berbuat sebaik-baiknya, demi kesejahteraan bersama dan pembangunan dunia.⁶

Dalam Tulisan Samsul Nizar dengan judul “Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun” pada tulisan ini menekankan pada pentingnya Negara dalam kehidupan manusia serta menekankan pada proses pembentukan Negara serta kriteria seorang pemimpin dalam suatu Negara, dengan tujuan supaya kehidupan dalam bersosial interaksi manusia satu dengan yang lain akan terjaga dan dapat terjamin kehidupannya.⁷

⁶ Hasaruddin, *Karakteristik Pemikiran Ibnu Khaldun*, Jurnal AL-FIKR □ Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010.

⁷ Samsul Nizar, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi Vol. II No.1 Th. 2003.

Jurnal yang ditulis Hafidz Hasyim dengan judul *Watak dan Peradaban Epstimologi Ibn Khaldun* dari penulisan jurnal tersebut menggunakan pendekatan Ibn Khaldun terhadap pemikiran sebelumnya dalam memaparkan fenomena dengan bersifat deskriptif dengan melihat proses transformasi sosial politik kekuasaan dapat disimpulkan bahwa Pemikiran Ibn Khaldun akan watak peradaban ditinjau dari sisi historis adalah gagasan oleh intelektual Islam sebelumnya. Ibnu Khaldun bermaksud mendirikan sosiologi untuk dijadikan metode penggalian kebenaran sejarah dengan tujuan untuk menggali kebenaran subyektif mungkin berdasarkan pengalaman dan dapat diterima dengan nalar logis dan empiris.⁸

Skripsi Hikma Hayati Lubis *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori structural fungsional dengan rumusan masalah abagaimana perkembang Umat Islam menurut Ibnu Khaldun. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa struktur sosial dan paranata sosial dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen saling menyatu dalam keseimbangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek peneitian. Hasil dari penelitian ini adalah pertama menyoroti pemaknaan ashabiyah Ibn Khaldun yang disitu menjelaskan lebih detail lagi makna Ashabiyah dalam pengertiannya yaitu lebih

⁸ Hasim Hafidz, *Watak Peradaban Dalam Epstimologi Ibn Khaldun*, Jurnal Humaniora Vol. 22 No. 3 Th. 2010.

kepada ruang lingkup Negara, kedua perubahan fenomena sosial dapat dijadikan bahan untuk melihat perubahan masyarakat kearah yang lebih baik, karena dalam hal ini masih terdapat pemikiran Ibn Khaldun yang relevan dengan kehidupan masyarakat dewasa ini.⁹

Skripsi Khairul Taqwim yang berjudul Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan relevansinya terhadap ekonomi Islam. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan teori Implementasi konsep ekonomi Islam dengan sifat penelitian deskriptif dan lebih mengarah menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tegaknya ekonomi ada ditangan Negara dan dijalankan secara adil serta untuk kemashalahatan umat secara universal dengan adanya perbankan yang berbasis syariah menunjukan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat teralisasi dalam bidang moneter serta menjadi jalan alternatif, sehingga pemikiran Ibn Khaldun dalam prinsip Islam menurut penulis sangat relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.¹⁰

Pada Skripsi Muhammad Taufik dengan judul Ide Demokrasi dalam Konsep Ashabiyah, dalam tulisan ini menggunakan pendekatan Historis karena penelitian ini menyakut kajian sejarah dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi,

⁹Hikma Hayati Lubis *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁰Khairul Taqwim, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

memverifikasi serta mensistesisikan bukti-bukti guna menegakan fakta-fakta sehingga memperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsep ashabiyah cocok untuk kontek demokrasi karena ashabiyah mengandung nilai-nilai *syar'i* yaitu dalam penyelenggaraan Negara tidak mengabaikan pertimbangan akal dalam menentukan kebijakan kemashalahatan umat, selain itu dalam era demokrasi ini ashabiyah dapat diartikan sebagai sebuah partai politik untuk dijadikan alat menuju sebuah kekuasaan dalam ajang Pemilu atau Pemilukada. Dalam sistem Ashabiyah mengenal bentuk perwakilan hal ini sama dengan bentuk sistem demokrasi khususnya di Indonesia yang mengenal keterwakilan, sehingga seluruh elemen dapat ikut membangun Negara.¹¹

Pada Skripsi Pemikiran etika Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah yang menggunakan metode pendekatan historis, dan ingin mengetahui tentang kekuasaan menurut Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah, kensep etika politik keduanya serta perbandingan antara konsep pemikiran Ibn Khaldun dan Ibn Taimiyah. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari konsep tentang kekuasaan menurut keduanya keberadaan kekuasaan atau Negara sebagai sebuah keharusan karena ini sudah menjadi kodrat manusia untuk saling hidup berdampingan, dengan tujuan semata-mata untuk Allah SWT. Kemudian Selain itu Ibn Taimiyah

¹¹ Muhammad Taufik, *Ide Demokrasi Dalam Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

berpendapat bahwa pengamalan agama tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kekuasaan. Kemudian tujuan dalam kekuasaan adalah syariat.¹²

Buku Filsafat Sejarah Islam Ibn Khaldun ditulis oleh Zainab Al-Khudari, buku ini menempatkan Ibn Khaldun sebagai pengagas dasar ilmu sosial dengan mengkompirasikan pemikiran Adam Smith dibidang ekonomi, sedangkan dibidang Negara dikomparasikan dengan Ibn Qutaibah al-Binawari dalam karyanya *'uyun alkhbar*.¹³ Selain itu dalam bukunya Wendy Melfa dan Sholihin Siddiq dengan judul buku "Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam Study Epstimologi Pemikiran Ibn Khaldun, isi dari buku tersebut menguraikan tentang pemikiran sosiologi Ibn Khaldun dalam pengembangan Masyarakat Islam yang kemudian diterapkan dalam tiga aspek pemberdayaan yaitu pemberdayaan dan pembinaan pada matra ruhaniah, intelektualitas dan pemberdayaan dalam matra ekonomi.¹⁴

Maka melihat karya-karya diatas belum ditemukannya konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibn Khaldun untuk itu menurut penulis masih dirasa perlu untuk menelaah lebih lanjut tentang ekonomi dan kekuasaan dalam pandangan Ibnu Khaldun dengan melihat korelasi antar keduanya sehingga penulis dapat menyajikan penulisan tentang kekuasaan politikdan ekonomi Ibnu Khaldun dalam dinamika politik. Disisi lain penelitian ini dianggap relevan karena dari pemaparan

¹²Asep Sholahuddin, *Pemikiran etika Ibnu Taimiyah dan Ibn Khaldun*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

¹³Zainab Al-Khudari, *Filsafat Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi Ustman (Bandung: PT.Pustaka,tt)

karya tersebut menunjukan ugensu antara perkembangan politik diera abad pertengahan dengan perkembangan politik modern masih berkesinambungan walaupun bentuk dan mekanisme perbedaan perilakunya berbeda dalam pemaknaannya, lebih-lebih yang berkaitan dengan politik ekonomi.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan sebuah teori dalam mengupasnya sehingga penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang terarah. Untuk itu kaitanya membedah konsep Ibn Khaldun tentang politik ekonomi maka penulis mengawali dengan memaparkan tentang peran Negara dalam prespektif aliran Realisme. Dalam padangan Realisme menyatakan Bahwa negara memiliki peran yang sangat aktif, karena negara memiliki agenda-agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam wilayah pribadi (perekonomian)¹⁵ dengan merujuk pada otonomi negara, yang dipahami sebagai kemampuan negara untuk mendefinisikan semata-mata oleh kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Definisi pendekatan yang berpusat pada negara sebagaimana yang diungkapkan penulis adalah memandang wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi.

Pengertian negara yang dikutip penulis mengutip seperti yang diungkapkan oleh Max Weber yang mendefinisikan Negara sebagai suatu masyarakat yang

¹⁵ James A. Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 447.

mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.¹⁶ Sedangkan dalam literatur lain Robert M. MacIver mengungkapkan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undnagannya melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.¹⁸

Penulis mengungkapkan bahwa pada dasarnya ide tentang otonomi negara merujuk pada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor sosial (terutama faktor ekonomi). Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh “eksternal” memiliki tiga konsekuensi¹⁹, yaitu: *Pertama*, adalah bahwa negara yang dikatakan bebas akan mampu “menang dalam melawan” tekanan-tekanan dari masyarakat sipil; *Kedua*, bahwa tindakan negara dipandang sebagai tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau antarkelompok manapun; *Ketiga*, bahwa negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar.

¹⁶ H.H. Gerth and C.Wright Mills, trans., eds and introduction, *From Max Weber:Essays in Socilogy* (New York: Oxford University Press, 1958), hlm. 78. “*The state is human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use physical force within a given terrritory*”

¹⁷ R.M. Maclever, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1926), hlm. 22.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 49.

¹⁹ Caporaso dan David P. Levine, *Teori-Teori Ekonomi*, hlm. 448.

Maka konsep nasional dalam pembangunan dibangun dengan independen tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain walaupun Negara juga harus bisa memproteksi diri dengan keberadaan-keberadaan pengaruh dari Negara lain yang bisa merusak konsep dan tujuan dari Negara tersebut.

Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan, (yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dan kesejahteraan (*Prosperity*) merupakan kepentingan nasional yang utama. Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.²⁰

Artinya Negara berkepentingan dalam menyelamatkan Kepentingan nasional sebagai bagian dari alat supaya pengaruh Negara tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu permasalahan yang timbul di masyarakat menjadi kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional.” Sedangkan

²⁰ T. May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 116.

menurut Morgenthau, "Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik".²¹

Melihat paparan diatas tentu dalam hal ini teori peran Negara dalam pandangan realis mempunyai peranan penting ketika Negara tersebut ada dan untuk kepentingan orang banyak, dengan berlandsakan kewajiban penyelenggara Negara dalam hal ini adalah pemimpin menjalankan kepemimpinannya tersebut sesuai aturan dengan tujuan untuk melayani masyarakat, sehingga akan terciptanya kehidupan yang aman adil dan makmur. Alur yang demikian ini menurut penulis cocok untuk menganalisa relevansi konsep pemikiran Ibn Khaldun tentang politik ekonomi, karena kekuasaan dalam hal ini sebagai alat untuk meyenggarakan serta ekonomi adalah salah satu bagian dari implementasi dari kebijakan penguasa, sehingga akan diketahui bagaimana keefektifan relevansi kekuasaan dalam menjalankan ekonomi dalam di dinamika politik yang berjalan dengan sedemikian rupa.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar karya ilmiah maka peneliti menggunakan metode yang mengarah serta menjadi pedoman dalam penulisan.

²¹ *Ibid.*,

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitaian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library reseach*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan aspek analisa dan kajian teks, terutama dengan data yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, majalah, artikel maupun opini.²²

Penelitian ini bersifat *deskritif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, Metode *deskritif analisis* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²³ Adapun analisis disini adalah: analisis dalam pengertian normatif, yaitu meneliti kejelasan bagaimana Konsep kekuasaan dan ekonomi menurut Ibnu Khaldun dengan mengkoperasikan situasi perkembangan politik di era demokrasi seperti sekarang ini.

2. Jenis Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan yang kedua sumber sekunder.²⁴

- a. Data Primer yaitu data yang disandarkan pada kitab *Muqaddimah* Ibn Khaldun yang secara akademis telah dipandang otoritatif.

²²Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²³Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm.63.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet.XVI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73.

- b. Data Sekunder yaitu data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa buku, arsip, majalah ilmiah, deserti, tesis, dokumen dan lain sebagainya.

Dalam pengumpulan datanya penelitian ini didasarkan pada riset pustaka yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisa dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dan informasi ini diperoleh bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik berupa arsip maupun dokumen ataupun majalah.

3. Pendekatan

Mengingat penelitian ini berkaitan dengan penelitian sejarah, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah historis yaitu sebuah pendekatan masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan dan mengevaluasi serta mensitesikan untuk memperoleh fakta-fakta dan kesimpulan yang kuat.²⁵ Maka dalam menganalisa dengan menggunakan pendekatan historis ini konsep kekuasaan dan ekonomi Ibn Khaldun ini dapat dirincikan yang kemudian dalam realita politik di era demokrasi ini, kemudian dapat dilihat relevansinya antara ekonomi dan kekuasaan dalam dinamika politik yang ada.

4. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif analitik, yaitu teknik dengan

²⁵*Ibid*, hlm. 74.

mendeskripsikan data-data yang ada dan kemudian dilakukan analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.²⁶ Kemudian dilakukan perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, yang kemudian penulis mengkombinasikan sehingga menghasilkan pemikiran yang padu.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitaian ini disusun dalam lima bab. Adapun hal-hal yang termuat pada bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini sebagai acuan dalam kelanjutannya.

Bab Kedua, Menjelaskan tentang proses berjalannya kekuasaan dan hubungan antara politik dan kekuasaan data-data yang diperoleh dari letiratur yang ada. Dalam bab ini berisikan tentang, , pemikiran Ibnu Khaldun dan hal yang mempengaruhi dari pemikiran yang ada, menggambarkan perkembangan politik serta ide-ide tentang kekuasaan, hubungan politik dan ekonomi.

Bab ketiga menjelaskan tentang relevansi kekuasaan dan ekonomi yang dipaparkan Ibnu Khaldun dengan perkembangan politik prinsip-prinsip bernegara prinsip-prinsip pengambilan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam

²⁶ Aswar, *Metode Penelitian*, hlm. 63.

bidang ekonomi serta etika pengusaha dalam keterlibatan dalam pengambilan kebijakan politik dalam berdemokrasi yang benar dalam

Bab empat. Islam memaparkan tentang data-data yang diperoleh tentang konsep ekonomi yang dijelaskan Ibn Khaldun, yang isinya memaparkan tentang perekonomian, mekanisme prinsip-prinsip dalam berinteraksi ekonomi yang benar.

Bab lima, sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas dasar uraian dalam bab dan sub bab tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manusia sebagai makhluk di dunia ini membutuhkan bantuan dan perlindungan orang lain, maka dirinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka tidak heran kalau manusia dalam menjalankan aktivitasnya mencari teman untuk menjalankan salah satunya perekonomian tersebut. Dilain hal untuk mengatur beberapa keinginan-keinginan dari setiap individu tentunya dibutuhkan para pengatur, dengan tujuan supaya dalam penyelesaian masalah individu-individu dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana sehingga manusia dapat bisa memenuhi kebutuhan bersama secara berdampingan. Maka pengatur dalam hal ini adalah pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara sebagai penengah dan pemimpin masyarakat.

Maka dalam mekanisme pasar dalam ekonomi Negara mempunyai andil yang sangat besar, menurut Ibnu Khaldun pemerintah harus bisa mengendalikan harga dan memberi fasilitas. Mengendalikan harga dengan cara memperingan pajak supaya dalam produksi tidak mengeluarkan banyak biaya, disisi lain pemerintah memberikan fasilitas alat tukar menukar dalam bentuk uang, karena uang ini selain sebagai bentuk nilai kesejahteraan, uang juga bisa sebagai

ukuran pertukaran dan penyimpanan nilai. Selain itu Dalam menjalankan aktivitas perekonomian ini tidak terlepas dalam hal ini adalah pembayaran pajak masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini di perlukan mengingat Pembayaran pajak pada prinsipnya digunakan untuk kemshalahatan masyarakat, karena dari pajak inilah kedepan infrastruktur yang mempermudah perekonomian dibangun, dengan tujuan supaya akses distribusi serta akses dalam pelayanan terhadap masyarakat bisa terpenuhi. Namun dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah tidak boleh hanya di nikmati oleh segilitir orang yang ada di kekuasaan, karena sebagai pemimpin pada hakekatnya adalah sebagai pelayan masyarakat bukan membebani masyarakat dengan menghancurkan perekonomian masyarakat.

2. Dalam merealisasikan tujuan penyelenggaraan ekonomi maka seorang pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut tanpa ada bantuan dari para pembantunya. Maka Ibnu Khaldun berpendapat untuk dibentuknya lembaga-lembaga pembantu raja atau khalifah seperti Wazirah, *Al Hijabah* (Penjaga Pintu), Departemen Pekerjaan Umum dan Retrubusi, Bidang Korespondensi dan Sekertaris Kerajaan, Polisi, Palingma Armada laut. Dari kesemuanya ini adalah pembantu para raja guna merealisasikan program-program perekonomian yang berkelanjutan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan ekonomi umat yang berupa kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat dengan tetap berpegang dengan nilai-nilai Islam.

Dalam menstabilkan harga peran pemerintah dalam hal ini harus mempunyai alat ukur dalam menentukan arah ekonomi sebagai patokan inflasi perekonomian Negara, dalam hal ini Ibnu Khaldun menjadikan nilai emas dan perak menjadi barometer standar moneter dalam mengukur tingkatan inflasi karena keterlibatan pemerintah dalam hal ini dapat menentukan arah moneter dengan menentukan arah perekonomian.

3. Ibnu Khaldun menyoroti tentang tentang fokus Negara dalam membangun sektor produksi Ibnu Khaldun menekankan untuk meningkatkan produksi barang di dalam negeri. Karena dengan melihat potensi yang ada dalam negeri dan menfokuskan masyarakat untuk mempunyai spesialisasi kerja akan mendorong produktivitas pekerja sehingga proses produksi menghasilkan *out put* maksimum. Dengan melimpahnya *out put* produksi maka akan ada kelebihan *supply* yang memungkinkan negara melakukan ekspor. Hasil ekspor ini akan membuat neraca pembayaran negara positif. Maka dengan kondisi seperti ini produksi dalam negeri bisa bersaing di pasar luar negeri, dan dalam proses produksi negara harus bisa mengupayakan efisiensi karena dengan efisiensi tersebut harga barang yang diekspor akan mampu bersaing di pasar luar negeri.
4. Peran Negara yang paling disoroti ialah kehadiran Negara dalam menstabilkan harga. Peran pemerintah dalam hal ini harus mempunyai alat ukur dalam menentukan arah ekonomi sebagai patokan inflasi perekonomian, Negara dalam hal harus memiliki tolak ukur dalam nilai tukar menukar, dengan melihat

bentuk barangnya bukan jumlah nominalnya maka yang menjadi patokan dalam jual beli tersebut adalah nilai emas dan perak. Dengan menentukan nilai emasa dan mperak sebagai barometer standar moneter dalam mengukur tingkatan inflasi hal ini menunjukkan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam perekonomian.

5. menghadapi kebebasan pasar modern Negara harus bisa memberikan bekal *skill* yang kuat terhadap pekerja supaya dapat bersaing di dunia internasional, selain itu dalam menerapkan kebebasan pasar modern tersebut Negara harus menerapkan prinp-prinsip al-Rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*) persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas, keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Selain itu Negara dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang harmonis dan beradab harus selalu mempraktekan Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), Keadilan

(*al-'adalah*), Persaudaraan (*al-ukhuwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'adduddiyah*), persamaan (*al-musawah*), permusyawaratan (*al-syura*), mendahulukan perdamaian (*al-silm*), kontrol (*amr bi al-ma'ruf nahi 'an al-munkar*). Maka dengan ini semua kondisi politik, hukum, ekonomi dalam suatu Negara akan terkendali dengan aman tanpa adanya hambatan yang signifikan.

B. Saran

1. Sebuah Negara yang dibangun dengan dukungan kalangan mayoritas, maka jika pemimpin tersebut mendapat amanah untuk memimpin supaya untuk tidak meprioritaskan kepentingan golongannya tetapi seorang pemimpin tersebut benar-benar loyal terhadap seluruh masyarakat, karena adanya kekuasaan ini untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan untuk mengatur kehidupan golongan tertentu. Maka untuk golongan tertentu saja maka kekuasaan yang ada akan di nikmati oleh orang-orang tersebut.
2. Menjadi pemimpin memang tidak harus mengurus segala urusan, namun setidaknya seorang pemimpin supaya dalam kepemimpinannya dianggap sebagai pemimpin yang berwibawa setidaknya, pemimpin tersebut dapat mengkordinasikan dari satu sector dengan sector yang lain, sehingga berjalannya kekuasaan tersebut akan lebih terlihat rapi dan akan memperlancar perjalanan perekonomian.

3. Maka dengan sistem ekonomi yang demikian kompleks, untuk itu dalam pengelolaan pajak pemerintah tidak hanya menikmati kekayaan untuk kepentingan pribadi namun Negara juga harus diuntmakan untuk kebutuhan masyarakat dengan membungun infrastruktur, fasilitas sehingga kehidupan masyarakat akan terjamin serta menuju kepada sejahtera dan jauh akan terjadinya kehancuran kehancuran ekonomi. Maka untuk Menjadi pemimpin memang tidak harus mengurus segala urusan, namun setidaknya seorang pemimpin supaya dalam kepemimpinanya dianggap sebagai pemimpin yang berwibawa setidaknya, pemimpin tersebut dapat mengkordinasikan dari satu sector dengan sector yang lain, sehingga berjalannya kekuasaan tersebut akan lebih terlihat rapi dan akan mempelancar perjalanan perekonomian.
4. Sebagai seorang makhluk sosial yang akan butuh akan kebutuhan, ketika seorang pemimpin ikut dalam pelaku pasar sebagai seorang individu pada prinsipnya tidak disalahkan, namun secara etik tidak patas, ditakutkan ketika akan terjadi konflik kepentingan dengan kepentingan jabatan. Karena ditakutkan dengan kekuasaannya tersebut serang pemimpin tersebut akan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan terkait dengan ekonomi, sehingga akan memunculkan kepemimpinan yang otoriter.
5. Jika pemimpin tersebut dari kalangan mayoritas setidaknya ketika mendapat amanah untuk memimpin jangan hanya loyal terhadap golongannya tetapi seorang pemimpin ini benar-benar loyal terhadap seluruh masyarakat, karena

adanya kekuasaan ini untuk mengatur kehidupan masyarakat bukan untuk mengatur kehidupan golongan tertentu.

6. Dalam menghadapi perekonomian Global yang bebas Negara harus bisa memproteksi perkembangannya, khususnya Negara-negara berkembang dengan cara meningkatkan produktivitas dari Negara tersebut dengan melihat potensi yang bisa dikembangkan dari Negara tersebut. Selain itu Negara harus memberikan porsi *skill* terhadap rakyatnya supaya dapat bersaing dengan Negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1982.

B. Refrensi Umum

Abdul, Mun'im Al-Jamal, Muhammad, *Mausu'at al-Iqsisad al-Islami*. terj. Selangor, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Agustianto, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Signifikansinya dalam Konteks Kekinian*, makalah tidak diterbitkan, 2005.

Ali, Mukti, *Ibn Chaldun Dan Asal Usul Sosiologi*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.

Amalia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata, 2010.

Amaliah, Euis *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta, Granada Press, 2007.

Al-Khudari, Zainab, *Filsafat Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi Ustman, Bandung: PT.Pustaka, tt.

Al-Marwadi, Abu Hasan, *Al-Ahkam Asulthaniyah wa Wilayatuh al-Dinniyyah*, Cet-ke III, Mesir: al-Asabil Halabi, tt.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aswar, Saifudin *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Baga, Lukman Mohammad, *Fiqh Zakat: Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi* Bogor: tp, 1997.

Budiardjo, Miriam, *Konsep Kekuasaan; Tinjauan Kekuasaan dalam Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Caporaso, James A., dan Levine, David P., *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapre, M. Umer, *Islam dan tantangan Ekonomi*, trj Ikhawan Abidin, *Islam and Economic Challenge*, Cet ke- 1, Jakarta: Gema Isnani Press, 2000.
- _____, *The Future of Islamic Economic; An Islamic Prespective*, Edisi Terjemahan, Jakarta: SEBI, 2003.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasu Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2003.
- Evans, Peter, *Embedded Autonomy; State and Industrial Transformation*, New Jersey USA: Princeton University Press, 1995.
- Fahmi, Irham, *Pengatar Politik Ekonomi*, Cet-ke 1, Bandung Alfabeta, 2010.
- Frederich, A *History of Philosophy*, London: Press Limited, 1953.
- Fakhry, Majid, *Etika Dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawy, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Gerth, H.H., dan Mills, C. Wright trans., eds and introduction, *From Max Weber: Essays in Socilogy*, New York: Oxford University Press, 1958.
- Hadi, Abd, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, September 2000.

- Hafidz, Hasim, *Watak Peradaban Dalam Epistimologi Ibn Khaldun*, Jurnal Humaniora Vol. 22 No. 3 Th. 2010.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah; Masail Fiqhiyah: zakat, pajak, asuransi, dan lembaga keuangan* Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hasaruddin, *Karesteritik Pemikiran Ibnu Khaldun*, jurnal AL-FIKR □ Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010.
- Husaini, S. Waqar, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
- Ibn al-Qayyim, Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukumiyyah*, Kairo: al-Muassah, al-“Arabiyyah, 1961.
- Karim, Adiwarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet ke I, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila*, disampaikan pada rapat kerja BP7 Pusat tanggal 3 Desember 1997, Sumber www.Ginandjar.com
- Khaldun, Ibnu *Muqodimah*, alih bahasa. Irham, Masturi dkk, Cet ke- 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- , *Muqoddimah*, terj. Ahmadie Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.
- Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Linda, Roza *Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam*, <http://rozalinda.wordpress.com/> diakses 13 November 2015.
- Lubis, Hikma Hayati, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Pengembangan Masyarakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Machfoezd, Irham dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Fitramaya, 2005.

- Masrohin, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Islam* Terj, *The Islamic Theory Government Accoding to Ibn Taimiyah*, Cet ke 3, Surabaya Risalah Dusti 1999.
- Misabakhul Munir, *Peranan Pemerintah dalam Perekonomian dalam prespektif Islam*, Makalah tidak diterbitkan,
- Sholahudin, Muh., *Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara Dalam Prespekti Ekonomi Pasar*, Junal maliyah, vol.1 no 1`Juni 2011.
- Maclever, R.M., *The Modern State*, London: Oxford University Press, 1926
- Mustofa, Muhammad, *Tinjauan Terhadap Penetapan Pengupahan Minimum Pasal 1 ayat 1 dan 2 Dalam Permenaketrans*, Skripsi tidak diterbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nata, Abuddin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2000.
- Nizar, Samsul, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi Vol.II No.1 Th. 2003.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi , Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Pulungan, J. Sayuthi, *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Rabily, Osman *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, Cet. Ke 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Rejeki, Sri, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Rudy, T. May, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Rosadi, Muhammad Riza, *Bahaya Kebebasan Kepemilikan*, sumber <http://mtaufiknt.wordpress.com/> diakses 13 November 2015.
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 1992.

- Sholahuddin, Asep, *Pemikiran etika Ibnu Taimiyah dan Ibn Khaldun*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sobary, Muhammad, “*Dialog Intern Islam: Ukhuwah Islamiyah*” dalam *Passing Over*, Paramadina: Jakarta, 1998.
- Sommerfeld, et., al.. *Concepts of Taxation*, San Diego: The Dryden Press. 1994.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Smith, Adam *The Wealth of Nations, the electronic publication series*, The Pennsylvania State University: 2005
- Soekanto, Soerjano *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke-34, Jakarta: Garafindo Persada, 2004.
- Sulaiman, Fattiyah, Hasan *Pandangan Ibnu Khaldun tentang Ilmu dan Pendidikan*, Alih Bahasa. HMD Dahlan, cet. Ke-1, Bandung: Diponegoro, 1987.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.XVI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Model*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Swasono, Sri Edi kata sambutan dalam buku Dmanhuri, Didin S.. *Negara, Civil Society, Pasar dalam Kemelut Globalisasi*, Jakarta: FE-UI Press, 2009.
- Syafi’ie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Taufik, Muhammad, *Ide Demokrasi Dalam Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu al-Fatawa*, Ttp:tnp,t.t, XXVIII.

Taqwim, Khairul, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Wafi, Ali. dan Abdul, Wahid, *Ibn Khaldun : Riwayat Dan Karyanya*, Alih Bahasa. Ahmadie Thaha, Cet. Ke-1, Jakarta: Grafitipers, 1985.

Wirawan, B. Ilyas, dan Burton, Richard *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Edisi Kelima Jakarta: Salemba Empat 2011

Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta:Gramedia, 1992.

C. Web

[Http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com,.](http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com,.)

<http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/pemikiran-ekonomi ibnu khaldun.>

[https://mafiainegara.wordpress.com/2010/02/07/redbird-fly-away-4/.](https://mafiainegara.wordpress.com/2010/02/07/redbird-fly-away-4/)

[http://sakauhendro.wordpress.com/ .](http://sakauhendro.wordpress.com/)

LAMPIRAN

TERJEMAHAN KUTIPAN ARAB, AYAT AL-QUR'AN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1	27	9	Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.
2	31	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).
3	33	45	Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan manusia yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah karunia (yang dicurahkan) atas semua alam.
BAB III			
4	66	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.
BAB IV			
5	99	28	Supaya harta itu tidak hanya berada di antara orang-orang kaya di antara kamu.

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun mempunyai nama lengkap 'Abd al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu al-Khalid Ibnu 'Usman Ibnu Hani Ibnu al-Kathab Ibnu Kuraib Ibnu Ma'dikarib ibn Harish Ibnu Wail Ibnu Hujr. Nenek-moyang Ibnu Khaldun adalah berasal dari Hadhramaut, Yaman Selatan, dan kemudian hijrah ke wilayah Hijaz sebelum datangnya Islam. Nama Ibn Khaldun, sebutan yang populer untuk dirinya, dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ke sembilan, yaitu al-Khalid. Khalid ibn Usman adalah nenek-moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab lainnya pada abad ke-8 Masehi.

Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya yaitu Muhammad Ibnu Muhammad, ayah Ibnu Khaldun adalah seorang yang berpengetahuan agama yang tinggi. Namun proses pembelajaran ini tidak berlangsung lama karena ayahnya meninggal. Setelah itu Ibnu Khaldun mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para gurunya di Tunis. Ibnu Khaldun menyebutkan beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya, di antaranya Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Sa'id al-Anshari dan Abu al-'Abas Ahmad Ibnu Muhammad al-Batharni dalam ilmu qira'at; Abu 'Abdillah Ibnu al-'Arabi al Hashayiri dan Abu al-'Abbas Ahmad Ibnu al-Qashar dalam ilmu gramatika Arab Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Bahr dan Abu 'Abdillah Ibnu Jabir al-Wadiyas dalam ilmu sastra; Abu 'Abdillah Ibnu 'Abdillah al-Jayyani dan Abu 'Abdillah Ibnu 'Abd Salam dalam ilmu fiqh; Abu Muhammad Ibnu 'Abd Muhaimin al-Hadhram dalam ilmu hadis; Abu al-'Abbas Ahmad al-Zawawi dalam ilmu tafsir; dan Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Abili dalam bidang 'ulum 'aqliyyah, seperti filsafat, logika, dan metafisika.

Karya pertama Ibnu Khaldun adalah kitab *al - Ibar wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayyam al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar wa Man- Asharahum min Dzawi al-Sulthan al-Akbar* dan kitab yang terkenal dan populer adalah *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Beberapa karya lain Ibnu Khaldun antara lain *Al-Ta'arif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuh Gharban wa Syarqan*, *Burdah al-Bushairi*, *Luhab al-Muhashshal fi ushul al-Din*, *Syifa al-Sail Li Tahdzib al-Masail*.

CURRICULUME VITAE

1. Nama : Mohammad Mushoffa
 2. Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 20 Februari 1989
 3. Alamat Asal : Desa Karas RT/01/RW 01 Sedan Rembang
 4. Alamat Yogyakarta : Perum Candi Gebang Permai blok K No.3,
Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta
 5. Pekerjaan : Mahasiswa dan Pedagang
 6. Hobby : Sepak Bola
 7. E-mail : mohammadmushoffa@yahoo.co.id
 8. Riwayat Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Ni'amullah
 - b. Pekerjaan : Guru
 - c. Nama Ibu : Hj Maftuhah
 - d. Pekerjaan : Guru
- Alamat : Desa Karas RT/01/RW 01 Sedan Rembang

Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Riyadlatut Thalabah Sedan : Lulus Tahun 2001
2. MTs Riyadlatut Thalabah Sedan : Lulus Tahun 2004
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati : Lulus Tahun 2007
4. UIN Sunan Kalijaga : Lulus Tahun 2011

Riwayat Pendidikan Nonformal

1. Ponpes al-Kaukab as-Sathi' Karas Sedan : 2001-2004
2. Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati : 2004-2007
3. Ponpes al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta : 2007-2011

